

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu ini dikaji, ditelaah serta untuk mencari perbandingan dari penelitian sebelumnya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, dan Novia Handayani dengan judul “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal”

Perilaku merokok yang melibatkan anak remaja sekolah menengah pertama (SMP) sehingga menjadi patokan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian menggunakan deskriptif analitik dan observasi dengan pendekatan cross-sectional. Yang bertujuan menganalisis implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah. Menggunakan kuesioner di 10 sekolah dengan populasi 86 sekolah di Kota Madiun. Hasilnya adalah dengan p-value 0,004 dan dukungan infrastruktur dengan p-value 0,001, analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara penerapan kawasan bebas rokok dengan ketersediaan sumber pendanaan. Tidak ada keterkaitan antara ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Dari pembahasan itu dapat diketahui

kesimpulannya masih terdapat siswa, guru, dan karyawan yang merokok di lingkungan sekolah, sehingga penerapan KTR di SMP dan sederajat masih belum optimal.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kawasan tanpa rokok di SMP sebagai pencegahan merokok pada remaja awal di sekolah. Sedangkan penelitian penulis adalah meneliti penerapan kawasan tanpa rokok. Penelitian tersebut menggunakan metoda kuantitatif Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan Cross-sectional sedangkan penelitian peneliti adalah kualitatif bersifat deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti dari peraturan kawasan tanpa rokok.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh “Riva Yusdi Maulidya dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg)”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi factor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Sukabumi. Van Metter dan Van Horn adalah teori yang digunakan pada penelitian ini. Aturan ini pun belum berjalan dengan baik disebabkan oleh harga rokok yang murah dan mudah terjangkau oleh semua

⁶ Yoshef Arieka Marchel, (dkk.), Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal, *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 7 No. 2, 2019 hal. 144, Tersedia di: <https://e-journal.unair.ac.id/PROMKES/article/view/13158>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

kalangan. Di sisi lain karakteristik pelaksana, khususnya KTR di Kota Sukabumi, telah melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.⁷

Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian ini berfokus pada Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg, yaitu perokok dalam angkutan umum, yang dalam penelitian tersebut juga mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Sukabumi. Selain penumpang yang merokok penelitian tersebut juga melihat mengenai kemauan dan respon pengemudi angkutan kota menolak adanya kawasan tanpa rokok di angkutan kota. Sedangkan persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada pada Alun-Alun M. Hasibuan Kota Bekasi dan meneliti penerapan kawasan tanpa rokok di Alun-Alun M. Hasibuan Kota Bekasi. Kemudian penelitian ini menggunakan teori Teori Van Metter dan Van Horn sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori dari Charles O. Jones.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Wili Depas, Lukmanul Hakim dan Dewi Noor Azizah dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Area Alun-Alun Karawang”

⁷ Riva Yusdi Maulidya, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg), *JPIS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Ilmu Sosial*, Vol. 27 No. 2, Desember 2018, hal 170, Tersedia di <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/12251/pdf> diakses pada tanggal 23 Maret 2022

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut David L. Weimer. Bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi kawasan tanpa rokok di Alun-Alun Kabupaten Karawang. Dikarenakan mudahnya menemui perokok yang sedang merokok di area alun-alun. Serta hasil dari riset ini menggambarkan bahwa kebijakan ini mempunyai tujuan untuk membuat masyarakat sehat akan tetapi, karena pemerintah, para pelaksana dan masyarakat kurang konsisten untuk menjalankannya maka implementasinya menjadi tidak optimal.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut menggunakan teknik *Purposive sampling*, sedangkan penulis menggunakan *Accidental sampling*. Penelitian tersebut juga membahas mengenai permasalahan yang melandasi terbentuknya kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Karawang serta menganalisis dan mengidentifikasi implementasinya. Sedangkan perbedaan lainnya ialah objek atau lokusnya yang berbeda penelitian ini lokusnya di alun-alun Karawang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada di Alun-Alun M. Hasibuan Kota Bekasi. Kemudian penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Teori David L Weimer sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori dari implementasi

⁸ Wili Depas (dkk.), Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Area Alun-Alun Karawang, *Jurnal Ilmiah Muqodimmah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol 6 No. 2, Agustus 2022, hal. 453, Tersedia di <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqodimmah/article/view/5497/pdf> diakses pada tanggal 23 Maret 2022

program Charles O. Jones. Persamaan lainnya ialah menggunakan metode kualitatif.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Perbedaan dan Persamaan
1	Marchel Yoshef Arieka, Indraswari Ratih, Handayani Novia (2019)	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal	Perbedaannya adalah penelitian ini fokusnya pencegahan merokok pada remaja awal dengan metode kualitatif observasional dengan pendekatan Cross-sectional sedangkan penelitian penulis adalah meneliti penerapan kawasan tanpa rokok dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Persamaannya adalah sama-sama meneliti peraturan kawasan tanpa rokok.
2	Riva Yusdi Mauliya (2018)	Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg)	Perbedaannya penelitian ini berfokus pada Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg, yaitu perokok dalam angkutan umum serta faktor pendukung dan penghambatnya. Persamaannya adalah menggunakan metode kualitatif.
3	Depas, Wili, Hakim, Lukmanul,	Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Area Alun-Alun Karawang	Penelitian ini teknik Purposive sampling, sedangkan penulis menggunakan Accidental sampling, membahas mengenai permasalahan yang melandasi terbentuknya kebijakan kawasan tanpa rokok di

	Ajizah, Dewi, Noor (2022)		Kabupaten Karawang menganalisis dan mengidentifikasinya. Persamaannya adalah menggunakan metode kualitatif.
--	------------------------------	--	---

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu aktivitas, pelaksanaan, atau penerapan yang dilakukan dengan berdasarkan perencanaan yang telah di rancang sebelumnya dan mewujudkan rencana itu sesuai arah tujuan dan kelompok sasaran yang sudah dikukuhkan. Menurut Agustino dalam Avianto dan Hasbi (2020) Implementasi adalah serangkaian kegiatan untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa output yang diharapkan dan diinginkan.⁹

Selain itu menurut Grindle (dalam Hardilina, Rusdiono & Tri Hutomo, 2019) menyatakan bahwa “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.¹⁰ Implementasi akan berjalan apabila semua program kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran penerapan sudah disusun, kemudian anggaran sudah tersedia sehingga dapat

⁹ Bhakti Nur Avianto, Muhammad Hasbi, Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan Tahun 2019, *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 3 , No. 1, Juni 2020, hal. 20, Tersedia di <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/800/pdf> diakses pada tanggal 4 April 2022

¹⁰ Hardilina, Rusdiono, Tri Hutomo, *Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Kubu Raya* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hal. 85

menyalurkan program agar mampu mencapai sasaran.¹¹ Implementasi bertugas untuk membangun sebuah jaringan yang menjadikan tujuan dari kebijakan itu tercapai melalui kegiatan yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*policy stakeholders*).¹² Implementasi suatu kebijakan atau program akan memudahkan untuk menilai dan mengevaluasi apakah kebijakan yang dilaksanakan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau memerlukan adanya perbaikan atau peninjauan ulang mengenai kebijakan yang sudah diimplementasikan.¹³ Dengan itu dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari program kegiatan yang dilakukan.

2.2.2 Teori Implementasi

Menurut Nugroho (2018) menyatakan bahwa pada prinsipnya implementasi itu merupakan sarana bagi suatu program atau suatu kebijakan mampu mencapai tujuannya yang telah disahkan, untuk melaksanakan suatu program atau suatu kebijakan publik, memiliki dua pilihan tahapan pertama seperti mengimplementasikannya langsung ke dalam bentuk sebuah program, yang keduanya dengan merumuskan kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.¹⁴ Adapun beberapa teori-teori implementasi menurut para ahli diantaranya:

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Bhakti Nur Avianto & Muhammad Hasbi, *Loc.Cit*

¹⁴ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hal. 728

a. Teori Implementasi Charles O. Jones

Implementasi Model Charles O. Jones (dalam Agustino, 2017:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni¹⁵:

1. Organisasi (*Organization*)

Organisasi, adalah upaya membentuk badan-badan, yang dilanjutkan dengan menata unit-unit sumber daya sebagai upaya menggerakkan program dengan melakukan cara restrukturisasi yang mengarah pada pelaksanaan program. Sehingga program tersebut dapat berhasil direalisasikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, serta program tersebut dapat memberikan dampak atau hasil pencapaian.

2. Interpretasi/Pemahaman (*Interpretation*)

Interpretasi, menafsirkan bahasa dalam program atau mengubahnya menjadi rencana dan arah sebuah tindakan yang tepat lalu sehingga bisa diterima kemudian dilaksanakan. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan ialah penjelasan substansi dari sebuah program ke dalam bahasa operasional yang mudah dimengerti agar isi pokok dari sebuah program tersebut dapat dilaksanakan dan diterima oleh seluruh pelaku atau orang yang menjadi sasaran dari program yang dilaksanakan.

¹⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 154-155

3. Penerapan (*Application*)

Penerapan, sebuah program akan berhasil jika dapat diterapkan secara maksimal, penerapan menjadi sentral yang penting dalam menyelenggarakan sebuah program. Maka dari itu dibutuhkannya prosedur kerja yang jelas seperti (SOP) yang perlu diterapkan agar program kerja dapat dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan serta sasaran program yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya. Adapun aktifitas yang dilakukan dalam penerapan atau pengaplikasian sebuah program yaitu kebutuhan yang rutin dari layanan pembayaran atau aktivitas lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan program dan perlengkapan program. Sehingga implementasi program dapat dilihat lebih jauh dan luas.

b. Teori Implementasi G. Shabbir Cheema dan Dennis Rondinelli

Pada teori G. Shabbir Cheema dan Dennis Rondinelli (dalam Subarsono, 2005:101) menurutnya dalam mempengaruhi kinerja implementasi program dan dampaknya pada sebuah program, setidaknya melibatkan empat variabel, yaitu¹⁶:

- 1) Kondisi suatu lingkungan;
- 2) Hubungan antar organisasi;
- 3) Sumberdaya organisasi untuk impelemntasi program;

¹⁶ AG. Subarsono, *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hal. 101

- 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

c. Model Implementasi George C. Edwards III

Menurut Edwards III (dalam Chazali H. Situmorang, 2016) terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi antara lain:¹⁷

- 1) **Komunikasi.**

Komunikasi menjadi hal terpenting bagi implementasi kebijakan yang efektif sehingga dapat terlaksana dan mereka para pelaksana keputusan harus paham apa yang akan mereka kerjakan dan perintah kebijakan perintah harus diteruskan ke personel yang sesuai sebelum sebuah keputusan dan perintah itu bisa diikuti.

- 2) **Sumber-Sumber.**

Sumber-sumber memiliki peranan penting yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, sumber-sumber penting tersebut diantaranya meliputi staf, wewenang, dan informasi.

- 3) **Kecendrungan-Kecendrungan.**

Kecendrungan pelaksana berdampak bagi berhasilnya implementasi yang sukses. Jika pelaksanaannya baik untuk kebijakan tertentu, dan ini artinya dukungan dari mereka lebih mungkin untuk menerapkan kebijakan seperti yang diharapkan tentunya oleh para pengambil keputusan.

¹⁷ Chazali H. Situmorang, *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*(Depok: Social, Security Development Institute, 2016), hal. 216

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai badan organisasi yang bekerja dalam melaksanakan setiap program kebijakan.

2.2.3 Program

Program merupakan instrumen bagian dari kebijakan yang terdiri dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh instansi/organisasi pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan dari dibuatnya program serta sasarannya, dalam bentuk kegiatan masyarakat yang dilakukan melalui koordinasi dari instansi pemerintah serta pada kegiatannya menerima alokasi anggaran. Pengertian program juga sering diartikan sebagai rencana atau garis besar rancangan kegiatan. Umumnya sebuah program dapat diartikan sebagai unit kegiatan dalam mewujudkan atau melaksanakan sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program adalah upaya berkelanjutan untuk menerapkan kebijakan. Sedangkan Menurut Jones (dalam Rohman, 2009: 101-102) menyatakan bahwa “program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan”.¹⁸ Implementasi program sebagai langkah-langkah atau tahapan yang dijalankan oleh para pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan dari sebuah kebijakan yang telah dihasilkan dan ditetapkan. Sehingga program-program yang dikeluarkan pemerintah sebagai langkah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang sudah diputuskan.

¹⁸ Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hal. 101-102

2.2.4 Kebijakan

Kebijakan atau *policy* dalam bahasa Inggris adalah sebagai rangkaian konsep pedoman, petunjuk dan arah dari tindakan yang menjadi pedoman dalam rangka perencanaan pelaksanaan pekerjaan, sekaligus kepemimpinan dan dasar bagaimana cara bertindak dalam suatu pemerintahan ataupun organisasi lain yang bertujuan untuk mengentaskan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, kebijakan sebagai pedoman dalam mengambil tindakan pada pengambilan sebuah keputusan. Konsep kebijakan menurut Mustopadidjaja (dalam Tahir, 2014) Kebijakan sering digunakan untuk menggambarkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan pemerintah, serta perilaku Negara secara keseluruhan dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai regulasi atau peraturan.¹⁹ Pada pelaksanaannya kebijakan yang digarap oleh Pemerintah Pusat atau Daerah akan dituangkan dalam Undang-Undang yang disetujui oleh DPR RI atau Peraturan Pemerintah yang disetujui oleh Presiden maupun Peraturan Daerah yang mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten.²⁰

2.2.5 Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *Public Policy* pada umumnya tertulis dalam bentuk peraturan-peraturan atau undang-undang yang harus dipatuhi dan diikuti oleh

¹⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 21

²⁰ Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hal. 108

masyarakat. Kebijakan publik ialah segala hal kegiatan yang dilakukan atau keputusan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan di lingkup masyarakat.²¹ Menurut Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014:35), yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.²² Selain itu menurut James E. Anderson dalam (Subarsono, 2005:2) menyatakan bahwa “kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”.²³ Kebijakan publik bukan hanya sebuah keinginan dari pemerintah dan para pejabat saja tapi untuk kepentingan masyarakat umum.

Kebijakan publik merupakan agenda kegiatan pemerintah yang disahkan untuk kepentingan masyarakat umum. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang mengikat dan mengatur masyarakat yang harus diterima secara sadar dan ikhlas, dibuat dan dikelola oleh para pemangku kebijakan atau juga pejabat publik.

2.2.6 Rokok dan Kandungan Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rokok adalah tembakau yang digulung yang kemudian dibungkus dengan daun, nipah, atau kertas yang disebut papir. Dan menurut Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2019 Tentang

²¹ Dumilah Ayuningtyas, *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 8

²² Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 35

²³ AG. Subarsono, *Op.Cit.*, hal. 2

Kawasan Tanpa Rokok, rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung kemudian dibungkus dengan kertas papir, daun, atau kulit jagung yang dipakai dengan cara dihisap setelah dibakar pada bagian ujung. Di dalam sebatang rokok terkandung zat adiktif dan bahan kimia berbahaya serta beracun lainnya yang dapat menyebabkan bahaya kanker. Rokok dapat membuat perokok kecanduan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi), hal ini disebabkan karena rokok yang merupakan zat adiktif. Bahaya rokok tidak hanya mengintai pada perokok aktif tetapi juga perokok pasif yaitu seseorang yang bukan perokok tapi terpaksa ikut menghisap atau menghirup asap rokok dari orang lain. Berikut ini zat-zat yang berbahaya yang terkandung didalam rokok adalah:

1) Nikotin

Nikotin dapat membuat perokok kecanduan dan ketagihan dari zat adiktif yang terkandung, sehingga sulit untuk berhenti merokok. Selain itu juga menimbulkan efek ketergantungan.

2) Tar

Tar memiliki banyak kandungan bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker. Tar juga membuat gigi berwarna kuning. Zat ini dapat mengendap dan tersimpan di paru-paru untuk waktu yang lama.

3) Karbon Monoksida

Karbon monoksida berasal dari pembakaran tembakau gas beracun tidak berasa maupun tidak berbau, dapat diserap ke dalam aliran darah. Efek dari gas ini adalah cepat lemas, pusing lelah hingga menghirup dalam jumlah besar dapat menyebabkan koma, hingga kematian.

4) Amonia

Amonia ialah gas yang beracun, tanpa memiliki warna, tapi berbau menyengat dan tajam. Akibat dari amonia ini dapat membuat sesak napas, sakit tenggorokan dan iritasi mata, lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan pneumonia dan kanker tenggorokan.

5) Formaldehida

Formaldehida adalah ampas dari pembakaran tembakau rokok, yang efeknya membuat iritasi pada mata dan juga hidung, serta gangguan tenggorokan pada jangka pendeknya. Lebih lanjutnya dapat memicu bahaya risiko kanker nasofaring pada jangka waktu yang lebih lama.

6) Arsenik

Dampak dari terpapar racun arsenik dalam kandungan yang tinggi memicu risiko bahaya terjadinya berbagai macam penyakit kanker yang mengintai seperti kanker paru-paru, kanker kulit dan penyakit kanker lainnya. Arsenik pada pertanian tembakau yang menggunakan pestisida saat penanaman tembakau. Dan zat-zat berbahaya lainnya.

2.2.7 Konsep Program Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.²⁴ Maka dari itu semua tempat, area atau kawasan yang sudah ditentukan sebagai area KTR harus bersih dan terbebas dari polusi asap rokok, penjualan, produksi, promosi dan sponsor rokok.

Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan daerah lainnya. KTR ini meliputi: 1) fasilitas pelayanan kesehatan, 2) tempat proses belajar mengajar, 3) tempat anak bermain, 4) tempat ibadah, 5) angkutan umum, 6) tempat kerja, 7) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.²⁵

Penerapan KTR yang dilaksanakan dengan konsisten bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan seluruh masyarakat khususnya menurunkan risiko penyakit dan kematian yang disebabkan akibat rokok, serta memperkuat budaya masyarakat dalam berperilaku pola hidup bersih dan sehat, melindungi

²⁴ Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 Huruf 11

²⁵ Admin Disperkimta. *Memahami Lebih Dalam Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*. <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-54> Diakses pada tanggal 19 Maret 2022

dari bahaya dampak negatif asap rokok yang mengganggu kesehatan bagi para perokok aktif dan pasif. Dari aspek lingkungan, penerapan KTR akan berdampak pada tewujudnya suatu lingkungan ataupun ruang yang bersih dan sehat. Dalam bidang ekonomi, pengurangan konsumsi tembakau dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga terutama keluarga miskin karena berkurangnya belanja rokok.²⁶

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2019:95) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.²⁷ Kerangka pemikiran berfungsi untuk menguraikan sementara gejala terhadap objek permasalahan yang diteliti. Berikut dibawah ini kerangka berpikir yang penulis susun:

²⁶ *Ibid*, <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-54>

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 95

Tabel 2.2

Kerangka Pemikiran

